

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah cabang penting dari Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ruang Lingkup Hubungan Internasional adalah hubungan kompleks yang ada di antara negara-negara berdaulat di dunia. Hal ini terutama berkaitan, antara lain, dengan studi mendalam tentang semua peristiwa dan situasi yang mempengaruhi lebih dari satu keadaan. Filsuf besar Yunani Aristoteles, mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Sifat dan kebutuhan dasar membuatnya memenuhi berbagai kebutuhan dalam pergaulan dan pola interaksi dengan orang lain. Selain itu, tidak ada manusia yang mencukupi dirinya sendiri bahkan dalam kebutuhan sehari-harinya, Oleh karena itu, manusia harus bergantung pada sesamanya untuk kelangsungan hidupnya (Schleicher, 1954).

Sama seperti individu yang tidak dapat hidup dalam isolasi, begitu pula negara juga tidak mampu hidup dalam isolasi. Seperti individu, tidak ada negara yang mandiri. Secara alami, suatu negara harus memupuk hubungan antar negara. Hubungan-hubungan ini adalah pokok bahasan Hubungan Internasional. Hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai kegiatan sosial politik dan jenis aspek interaksi lainnya di antara dua negara atau lebih. Bidang akademik

hubungan internasional adalah cabang ilmu sosial dan politik yang mempelajari hubungan antar negara, kebijakan luar negeri negara-bangsa, dan mekanisme institusi (seperti organisasi internasional, organisasi antar pemerintah internasional dan nasional, organisasi non-pemerintah dan perusahaan multinasional) di mana negara berinteraksi. Studi hubungan internasional melibatkan banyak mata pelajaran seperti perdamaian, keamanan internasional dan regional, organisasi internasional, proliferasi nuklir, globalisasi, hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, intervensi, hubungan keuangan internasional, dan hubungan perdagangan internasional.

Sejak awal, hubungan internasional telah didefinisikan dalam banyak cara. Seperti yang dikatakan Stanley Hoifrnann, "Bagaimana seseorang bisa setuju sekali tentang definisi bidang yang ruang lingkupnya selalu berubah-ubah. memang, bidang yang fluktuasinya berubah merupakan salah satu karakteristik utamanya" (Hoifrnann, 1964). Dengan demikian, hubungan internasional tidak dapat didefinisikan dengan cara yang dapat diterima secara umum. Prof. Charles Schleicher mendefinisikan hubungan internasional sebagai hubungan antar negara. Quincy Wright mendefinisikan hubungan internasional sebagai "hubungan antara kelompok-kelompok yang sangat penting dalam kehidupan dunia pada setiap periode sejarah." Menurut Prof. Hans Morgenthau, hubungan internasional adalah perebutan kekuasaan antar bangsa. Norman Podelford dan George Lincoln mendefinisikan hubungan internasional sebagai interaksi politik negara dengan pola hubungan kekuasaan yang berubah. Padelford dan Lincoln

mendefinisikannya sebagai "Interaksi kebijakan negara dalam pola hubungan kekuasaan yang berubah".

Namun, definisi umum yang dapat merangkum semua definisi dari hubungan internasional diberikan oleh Harold dan Margaret Sprout. Mereka mendefinisikan hubungan internasional sebagai "aspek-aspek interaksi dan hubungan komunitas politik independen di mana beberapa elemen oposisi, perlawanan atau konflik tujuan atau kepentingan hadir" (Sprout, 1963). Menurut Hartman "Hubungan Internasional sebagai bidang studi difokuskan pada proses dimana negara menyesuaikan kepentingan nasional mereka dengan kepentingan negara lain". Palmer dan Perkins berpendapat bahwa politik Internasional pada dasarnya berkaitan dengan sistem negara. Sprout and Sprout juga mendefinisikan hubungan internasional sebagai aspek interaksi dan hubungan komunitas politik independen di mana beberapa elemen oposisi, perlawanan dan konflik Pandangan Tradisional menjadi cakupannya. Hubungan Internasional ini adalah pandangan yang didominasi banyak negara. definisi di bawah kategori ini memberikan penekanan pada studi politik dan hubungan di antara negara-negara bangsa. Hal ini menganggap negara-bangsa sebagai aktor utama politik internasional dan berfokus pada hubungan sosial dan politik. Dengan kata lain, ini adalah definisi politik internasional dan bukan hubungan internasional. Dari tahun-tahun awal 1950an, hubungan internasional dikenal dan dipelajari sebagai inter politik nasional.

Para sarjana hubungan internasional berpikir bahwa ruang lingkungannya belum dibatasi. Belum ada yang dapat menyelesaikan semua pokok bahasan suatu disiplin karena cenderung bervariasi dengan waktu dan munculnya kondisi dan faktor baru. Tetapi harus ada inti disiplin yang terpisah untuk memenuhi syarat sebagai disiplin yang otonom. Sejauh ini, ruang lingkungannya telah diselesaikan. Selain itu, perkembangannya sebagai disiplin otonom telah ditelusuri.

Sejak Perang Dunia I dan terutama setelah Perang Dunia II, berbagai sarjana, universitas, organisasi akademik, dan institusi berusaha untuk mengukir bidang studi khusus untuk hubungan internasional. Beberapa dari mereka telah mengajukan daftar terbatas dan daftar isi lengkap lainnya. Hal ini menimbulkan kontroversi luas di kalangan peneliti. Berikut perbagian ruang lingkup hubungan Internasional.

2.1.2 Diplomasi

Diplomasi merupakan metode untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah dan masyarakat suatu negara melalui dialog, negosiasi, dan tindakan lain selain perang atau kekerasan. Praktik diplomatik modern adalah produk dari Reinasans yang merupakan sistem negara Eropa. Secara historis, diplomasi berarti pelaksanaan hubungan resmi (biasanya bilateral) antara negara berdaulat. Namun, pada abad ke-20, praktik diplomatik yang dirintis di Eropa telah diadopsi di seluruh dunia, dan diplomasi telah meluas hingga mencakup pertemuan puncak dan konferensi internasional lainnya, diplomasi parlementer,

aktivitas internasional entitas supranasional dan subnasional, diplomasi tidak resmi oleh elemen non-pemerintah, dan pekerjaan pegawai negeri sipil internasional. Istilah diplomasi berasal dari bahasa Yunani kuno *diplōma*, terdiri dari *diplo*, yang berarti "lipatan" dan akhiran *-ma*, yang berarti "sebuah objek." Diplomasi kemudian diidentikkan dengan hubungan internasional. Pada abad ke-18 istilah Prancis *diplomate* ("diplomat" atau "diplomatis") datang untuk merujuk pada orang yang berwenang untuk bernegosiasi atas nama negara.

Diplomasi adalah kategori praktik dan kategori analisis. Ini adalah label yang digunakan para praktisi untuk menggambarkan serangkaian cara yang terorganisir secara sosial dan bermakna dalam melakukan sesuatu di panggung internasional. Praktik diplomatik, dengan kata lain, mewujudkan bentuk-bentuk pengetahuan dan kompetensi yang bermakna secara sosial dan dapat dikenali pada tingkat tindakan. Diplomasi juga dapat dipahami sebagai kategori analisis, yaitu, sebagai blok bangunan konseptual dari sistem teoritis. Untuk mencapai tingkat itu, diplomat perlu menaiki apa yang disebut 'tangga abstraksi' dan melepaskan konsep elemen kontekstualnya yang mendalam. (E. Abdulrahmanli, 2021). Berdasarkan Sending, Pouliot dan Neumann, diplomasi didefinisikan sebagai 'klaim untuk mewakili pemerintahan tertentu kepada dunia luar.' Sebagai kategori analisis, konsep diplomasi kemudian bermuara pada tiga komponen utama, pertama, diplomasi adalah sebuah proses (mengklaim otoritas dan yurisdiksi); kedua, bersifat relasional (beroperasi antarmuka antara pemerintahan seseorang

dan orang lain); dan ketiga, bersifat politis (melibatkan perwakilan pemerintahan) (OJ Sending, 2015).

Definisi diplomasi tradisional menekankan pada agen pemerintah. Mengamati sifat diplomasi yang berubah, para sarjana secara progresif memperluas definisi ini untuk memasukkan tidak hanya interaksi antara agen resmi, tetapi juga antara perwakilan negara dan non-negara – yang disebut Wiseman sebagai 'polilateralisme' (2004). Selain itu, penstudi diplomasi telah mengalihkan perhatiannya ke kegiatan non-tradisional (diplomasi publik, diplomasi LSM, diplomasi digital, diplomasi ekonomi dan sebagainya). Dengan memperluas cakupan studi diplomatik, kumpulan literatur ini memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi studi tata kelola global (AF Cooper, 2008). Melissen (2011: 723) menyebut fokus inovatif ini pada berbagai kegiatan yang terlibat dalam diplomasi sebagai perspektif 'relasionalis' tentang politik dunia. Alih-alih melihat karakteristik internal aktor internasional, tujuan mereka atau konteks interaksi mereka, Melissen berpendapat, orang harus fokus pada interaksi atau hubungan itu sendiri. Penstudi yang berbeda mempelajari berbagai jenis interaksi. Beberapa menganggap negosiasi sebagai kegiatan dasar diplomasi, sementara yang lain menekankan pada komunikasi (C Bjola, 2013). Lambang dari perspektif relasional adalah penokohan Sharp dimana diplomasi sebagai hubungan antar kelompok yang ingin mempertahankan kondisi 'keterpisahan'. Dengan kata lain, diplomasi merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang

berbeda karena kelompok-kelompok politik yang masuk dalam hubungan tersebut mengklaim keberadaan yang berbeda satu sama lain (Sharp, 2009).

Di luar studi diplomatik itu sendiri, sejumlah teori hubungan internasional membantu dalam memahami bagaimana aspek-aspek kunci politik dunia muncul dari proses sosial *bottom-up* yang terkait dengan diplomasi. Realis klasik seperti Morgenthau dan Kissinger, misalnya, sangat memahami pentingnya praktik diplomatik dalam pelaksanaan politik internasional. Lebih dekat ke masa sekarang, konstruktivis juga telah menerangi berbagai proses sosial di panggung dunia, termasuk sosialisasi, pengaruh sosial, jebakan retorik, dan budaya organisasi. Berbagai teori hadir sebagai penekanan tentang pentingnya aktor yang bermain di dunia internasional. Sejumlah karya baru-baru ini juga telah membantu menjelaskan politik dunia dengan melihat berbagai praktik internasional yang terkait dengan diplomasi.

Diplomasi memiliki ruang lingkup baru setelah Globalisasi. Istilah globalisasi diambil dari bahasa Inggris dan digunakan dalam pengertian menghilangkan batas-batas baik dari bidang ekonomi, sosial, politik, dan aspek lainnya. Sebagai akibat dari globalisasi, diplomasi telah dibedakan dalam berbagai bidang sesuai dengan karakteristik tertentu. Jenis-jenis diplomasi seperti Diplomasi Mediasi; Diplomasi Multilateral; Diplomasi Ganda; Diplomasi Sipil; Diplomasi Puncak; Diplomasi Konferensi; Diplomasi Parlemen; Diplomasi Sosial; Diplomasi Nuklir; Diplomasi Budaya; Diplomasi Lingkungan; Diplomasi Kemanusiaan; Diplomasi Terbuka; Diplomasi Koersif; Hard Diplomacy; *Soft*

Power Diplomacy; *Cross Diplomacy*; dan Diplomasi Publik telah melengkapi setiap praktik dalam tatanan kerjasama dunia internasional.

2.1.2.1 Diplomasi Publik

Diplomasi publik, juga disebut diplomasi rakyat, salah satu dari berbagai upaya yang disponsori pemerintah yang bertujuan untuk berkomunikasi langsung dengan publik asing. Diplomasi publik mencakup semua upaya resmi untuk meyakinkan sektor-sektor sasaran opini asing untuk mendukung atau menoleransi tujuan strategis pemerintah. Metodenya meliputi pernyataan oleh para pengambil keputusan, kampanye yang bertujuan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah yang didedikasikan untuk diplomasi publik, dan upaya untuk membujuk media internasional untuk menggambarkan kebijakan resmi yang menguntungkan bagi khalayak asing (Jozef, 2008).

Ada dua jenis dasar diplomasi publik. Pertama adalah *branding*, atau komunikasi budaya, di mana pemerintah berusaha meningkatkan citranya tanpa mencari dukungan untuk tujuan kebijakan langsung. Negara menggunakan strategi *branding* untuk menumbuhkan citra diri mereka yang lebih baik di dunia. Idealnya, *branding* menciptakan niat baik umum dan memfasilitasi kerja sama di berbagai masalah, aliansi jangka panjang dan melemahkan propaganda (Gilboa, 2008).

Selama perang dingin, misalnya, Amerika Serikat menggunakan diplomasi publik untuk meyakinkan audiens Eropa bahwa fondasi demokratis dan kapitalis lebih unggul daripada soviet. *Voice of America* disiarkan langsung ke Pakta Warsawa Eropa timur untuk menghilangkan mitos tentang Barat. Pada saat yang sama, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat membangun dan memelihara ruang baca di negara-negara Sekutu, penuh dengan buku-buku tentang sejarah dan budaya. Departemen berharap bahwa paparan prinsip-prinsip dan ide-ide Amerika akan memperkuat dukungan luas untuk kebijakan Amerika Serikat (Report of USA Commission on Public Diplomacy from 1991, 1991).

Tipe kedua dari diplomasi publik mencakup berbagai strategi yang dirancang untuk memfasilitasi hasil yang lebih cepat, kategori yang terkadang disebut advokasi. Sedangkan *branding* dimaksudkan untuk mempengaruhi persepsi jangka panjang, kampanye advokasi politik menggunakan diplomasi publik untuk membangun dukungan asing untuk tujuan kebijakan langsung (Triwahyuni, 2010). Publik asing dapat didorong untuk mendukung atau menentang para pemimpin negara lain. Terkadang negara perlu dengan cepat meyakinkan audiens asing untuk mendukung strategi aliansi militer yang mahal. Para pemimpin asing mungkin ingin bekerja sama dengan rencana aliansi tetapi takut akan pembalasan domestik karena menyetujui tindakan yang tidak populer. Dalam kondisi ini, diplomasi publik dapat membantu para pemimpin

tersebut bekerja sama dengan mengurangi ancaman serangan balasan di dalam negeri.

Jenis advokasi politik ini diilustrasikan oleh upaya Kuwait pada tahun 1990 untuk mendapatkan dukungan rakyat Amerika Serikat untuk serangan terhadap Irak. Pada akhir 1990, Kuwait menyewa sebuah hubungan masyarakat untuk meyakinkan pemilih Amerika Serikat bahwa pembebasan dari diktator, Saddam Hussein diperlukan dan benar secara moral. Amerika memiliki perasaan campur aduk tentang intervensi, dan sebagian besar pemilih tahu sedikit tentang Kuwait. Presiden Amerika Serikat, George Bush khawatir dia tidak memiliki mandate untuk bertindak tegas terhadap Irak. Oleh karena itu Kuwait melakukan kampanye advokasi politik yang diatur dengan hati-hati untuk menunjukkan ruang lingkup kejahatan Saddam dan mendapatkan simpati Amerika.

Dalam kasus lain, negara menggunakan diplomasi publik untuk mendiskreditkan musuh. Negara-negara secara diam-diam atau eksplisit mendesak publik asing untuk menentang para pemimpin yang tidak memiliki kepentingan strategis. Strategi ini memiliki dua tujuan. Pertama, upaya mendorong kerja sama dengan menekan dukungan rakyat. Kedua, ketika prospek perubahan kebijakan minimal, hal itu mendorong audiens asing untuk memberontak melawan pemimpin mereka. Tidak ada strategi yang memiliki sejarah keberhasilan yang panjang, mungkin karena

kampanye diplomasi publik sering diterima dengan skeptis. Selain itu, pemimpin yang menjadi sasaran kampanye semacam itu dapat membatasi dan mendistorsi informasi dari luar sebelum sampai ke publik.

Pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia II, misalnya, Inggris Raya melancarkan kampanye yang tenang namun efektif untuk menggalang dukungan rakyat Amerika untuk tujuannya. Banyak orang Amerika merasa bahwa Inggris telah membesar-besarkan ancaman Jerman dalam Perang Dunia I dan secara tidak perlu telah menarik Amerika Serikat ke dalam konflik itu. Oleh karena itu, diplomat publik Inggris perlahan mengembangkan pesan mereka sambil berhati-hati untuk tidak menimbulkan tuduhan propaganda. Untuk melakukannya, mereka membangun hubungan dengan anggota korps pers Amerika Serikat, yang memiliki kredibilitas lebih dengan audiens Amerika. Mereka juga membatasi siaran langsung dari *British Broadcasting Corporation* ke Amerika Serikat.

2.1.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan salah satu aspek terpenting dalam politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan suatu negara (Timothy Edmunds, 2014). Konsep kepentingan nasional sangat terkait dengan pandangan realisme dalam hubungan internasional, di mana keamanan menjadi tujuan utama (Humphreys, 2014). Namun konsep ini

perlu disesuaikan dengan era globalisasi modern. Perubahan yang terjadi di seluruh dunia dapat menjadi tantangan bagi kepentingan nasional. Mungkin juga kepentingan nasional dipengaruhi oleh isu-isu lain, seperti “kepentingan supranasional”. Keadaan ini membuat pejabat negara mempertimbangkan keadaan ini ketika datang ke pendekatan lain untuk implementasi kebijakan luar negeri. Manusia tidak dapat menghindari pengaruh globalisasi, karena pengaruh globalisasi telah menjangkau berbagai aspek di dunia.

Dalam sistem internasional, globalisasi menciptakan ruang di mana persaingan terjadi di tingkat supranasional. Collingwood dan Logister mengklaim bahwa aktor internasional mendapatkan lebih banyak kekuatan melalui globalisasi (Vivien Collingwood, 2005). Globalisasi dapat mengubah cara pandang dan tanggapan masyarakat terhadap pandangan yang lebih duniawi. Berkaitan dengan argumen Starie, efek globalisasi bukan hanya masalah manusia; Demikian pula suatu negara perlu memiliki perilaku yang berbeda, termasuk konsep kepentingan nasional, agar dapat beradaptasi di era globalisasi. Konsep kepentingan nasional tidak lagi relevan dalam sistem internasional yang mengglobal karena tidak jelas apakah kepentingan ini milik 'bangsa' atau aktor lain. Munculnya kepentingan kolektif juga membuat sulit untuk mengenali tindakan negara mana yang termasuk dalam ranah kepentingan nasional.

Beberapa peneliti mengartikan kepentingan nasional sebagai berikut, Charles Lerche dan Abdul berkata bahwa kepentingan nasional berarti tujuan umum, jangka panjang, dan berkelanjutan yang diemban oleh negara, bangsa, dan

pemerintah. Menurut Vernon Von Dyke, kepentingan nasional adalah apa yang negara-negara coba lindungi atau capai dalam hubungannya satu sama lain. Itu berarti keinginan dari negara-negara berdaulat. Morgenthau berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup, perlindungan identitas fisik, politik dan budaya terhadap gangguan oleh negara-bangsa lain. Menurut VV Dyke, kepentingan nasional berarti nilai-nilai, keinginan dan kepentingan yang negara-negara coba lindungi atau capai dalam hubungannya satu sama lain” “keinginan di pihak negara berdaulat”. Melalui pengertian-pengertian diatas, disimpulkan kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tuntutan, tujuan, sasaran, dan kepentingan yang selalu berusaha dipertahankan, dilindungi, dan diamankan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.

Dalam menggambarkan kepentingan nasional, negara memiliki beberapa komponen seperti:

- A. Komponen Penting atau Vital Kepentingan Nasional dan
- B. Komponen Variabel atau Non Vital Kepentingan Nasional.

Komponen Penting atau Vital, Menurut Morgenthau, komponen vital kepentingan nasional yang ingin dijamin oleh kebijakan luar negeri adalah kelangsungan hidup atau identitas. Dia membagi identitas menjadi tiga bagian: Identitas fisik, Identitas politik dan identitas budaya.

Identitas fisik meliputi identitas territorial. Identitas politik berarti sistem politik-ekonomi. Sedangkan identitas budaya merupakan nilai-nilai sejarah yang

dijunjung tinggi oleh suatu bangsa sebagai bagian dari warisan budayanya. Ini disebut komponen vital karena ini penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan dapat dengan mudah diidentifikasi dan diperiksa. Suatu bangsa bahkan memutuskan untuk berperang demi mengamankan atau melindungi kepentingan vitalnya.

Suatu negara selalu merumuskan keputusan kebijakan luar negerinya dengan maksud untuk mengamankan dan memperkuat keamanannya. Upaya untuk mengamankan perdamaian dan keamanan internasional, yang sedang dilakukan oleh negara-negara, dilakukan karena saat ini keamanan setiap negara berdiri tak terpisahkan dengan perdamaian dan keamanan internasional. Keamanan, dengan demikian, merupakan komponen vital dari kepentingan nasional. Setiap negara selalu berusaha untuk mengamankan kepentingan vitalnya bahkan dengan cara perang.

Komponen Yang Tidak Vital Atau Tidak Tetap. Komponen yang tidak vital adalah bagian dari kepentingan nasional yang ditentukan baik oleh keadaan maupun oleh kebutuhan untuk mengamankan komponen vital tersebut. Ini ditentukan oleh sejumlah faktor seperti pengambil keputusan, opini publik, politik partai, kepentingan bagian atau kelompok, dan cara politik dan moral. Kepentingan-kepentingan yang berubah-ubah ini adalah keinginan-keinginan masing-masing negara yang ingin mereka lihat terpenuhi tetapi untuk itu mereka tidak akan berperang. Sedangkan kepentingan vital dapat dianggap sebagai tujuan, kepentingan sekunder dapat disebut sebagai tujuan kebijakan luar negeri.

Tujuan-tujuan ini telah diklasifikasikan oleh VV Dyke (Dyke, 1962) dan daftarnya meliputi: Kemakmuran, Perdamaian, Ideologi, Keadilan, Prestise, Kebesaran dan Kekuasaan. Meskipun setiap negara bagian mendefinisikan tujuan-tujuan ini dengan cara yang sesuai dengan kepentingannya dalam keadaan yang berubah, namun tujuan-tujuan ini dapat digambarkan sebagai hal yang umum bagi hampir semua negara bagian. Dengan demikian, kepentingan nasional yang ingin dijamin oleh suatu negara secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua bagian ini.

Agar lebih tepat dalam meneliti kepentingan yang ingin dijamin oleh suatu negara, Thomas W. Robinson menyajikan enam klasifikasi kepentingan yang coba dijamin oleh negara.

1. Kepentingan Utama

Ini adalah kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dikompromikan oleh negara mana pun. Ini termasuk pelestarian identitas fisik, politik dan budaya terhadap kemungkinan gangguan oleh negara lain. Sebuah negara harus mempertahankan ini dengan segala cara.

2. Kepentingan Sekunder

Kepentingan Sekunder cukup vital bagi keberadaan negara. Ini termasuk perlindungan warga negara di luar negeri dan memastikan kekebalan diplomatik bagi staf diplomatik.

3. Kepentingan Permanen

Kepentingan permanen mengacu pada kepentingan jangka panjang negara yang relatif konstan. Kepentingan ini tunduk pada perubahan yang sangat lambat. Contohnya, kepentingan Amerika Serikat untuk melestarikan wilayah pengaruhnya dan untuk menjaga kebebasan navigasi di semua lautan.

4. Kepentingan Variabel

Kepentingan variabel adalah kepentingan suatu bangsa yang dianggap vital untuk kebaikan nasional dalam situasi tertentu. Pengertian ini dapat menyimpang dari kepentingan primer dan permanen. Kepentingan variabel sebagian besar ditentukan oleh arus silang kepribadian, opini publik, kepentingan bagian, politik partisan dan *folkways* politik dan moral.

5. Kepentingan Umum

Kepentingan umum suatu negara mengacu pada kondisi positif yang berlaku untuk sejumlah besar negara atau di beberapa bidang tertentu seperti ekonomi, perdagangan, hubungan diplomatik, dan lain sebagainya. Untuk menjaga perdamaian internasional adalah kepentingan umum semua negara bangsa. Serupa dengan kasus perlucutan senjata dan kontrol senjata.

6. Kepentingan Khusus

Kepentingan ini adalah hasil logis dari kepentingan umum dan ini didefinisikan dalam ruang dan waktu. Untuk mengamankan hak-

hak ekonomi negara-negara melalui pengamanan Tata Ekonomi Internasional Baru.

Selain enam kategori kepentingan nasional ini, TW Robinson juga mengacu pada tiga kepentingan internasional yaitu kepentingan yang identik, kepentingan yang saling melengkapi, dan kepentingan yang saling bertentangan. Kategori pertama mencakup kepentingan-kepentingan yang umum bagi sejumlah besar negara bagian; kategori kedua mengacu pada kepentingan-kepentingan tersebut, yang meskipun tidak identik, dapat menjadi dasar kesepakatan mengenai beberapa isu tertentu; dan kategori ketiga mencakup kepentingan-kepentingan yang tidak saling melengkapi atau identik.

Bangsa memiliki hak dan kewajiban untuk mengamankan kepentingan nasional mereka dan mereka memiliki kebebasan untuk memilih sarana yang diperlukan untuk tujuan ini. Mereka dapat menggunakan cara-cara damai atau paksaan sebagaimana kepentingan suatu negara. Namun, untuk kepentingan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran internasional, negara-negara diharapkan untuk menahan diri dari menggunakan cara-cara koersif dalam perang dan agresi tertentu. Ini diharapkan bergantung pada cara damai untuk penyelesaian perselisihan dan untuk mengamankan kepentingan mereka. Sementara merumuskan tujuan dan sasaran kepentingan nasional, semua bangsa harus melakukan upaya untuk membuat ini sesuai dengan kepentingan internasional melalui perdamaian, keamanan, perlindungan lingkungan, perlindungan hak asasi manusia dan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan demikian, negara-negara harus berusaha untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan bersama demi kepentingan yang lebih besar dari seluruh komunitas internasional. Semua ini penting bagi setiap negara untuk merumuskan kebijakan luar negerinya dan untuk melakukan hubungannya dengan negara-negara lain berdasarkan kepentingan nasional, sebagaimana ditafsirkan dan didefinisikan selaras dengan kepentingan bersama umat manusia. Tujuan dari kebijakan luar negeri adalah untuk mengamankan tujuan yang ditetapkan dari kepentingan nasional dengan menggunakan kekuatan nasional.

2.1.4 Perusahaan Multinasional

perusahaan multinasional (MNC), juga disebut perusahaan transnasional, setiap perusahaan yang terdaftar dan beroperasi di lebih dari satu negara pada suatu waktu. Umumnya korporasi memiliki kantor pusat di satu negara dan mengoperasikan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya atau sebagian di negara lain. Anak perusahaannya melapor ke kantor pusat perusahaan.

Dalam istilah ekonomi, keuntungan perusahaan dalam mendirikan perusahaan multinasional mencakup skala ekonomi (yaitu, pengurangan biaya yang dihasilkan dari tingkat output yang diperluas dan konsolidasi manajemen) dan peningkatan pangsa pasar. Meskipun hambatan budaya dapat menciptakan hambatan yang tidak dapat diprediksi karena perusahaan

mendirikan kantor dan pabrik produksi di seluruh dunia, keahlian teknis perusahaan, personel yang berpengalaman, dan strategi yang terbukti biasanya

dapat ditransfer dari satu negara ke negara lain. Kritik terhadap perusahaan multinasional biasanya memandangnya sebagai sarana ekonomi dan, seringkali, politik dari dominasi asing. Negara-negara berkembang, dengan kisaran ekspor yang sempit (seringkali barang-barang primer) sebagai basis ekonominya, sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Praktik monopoli, pelanggaran hak asasi manusia, dan gangguan terhadap sarana pertumbuhan ekonomi adalah beberapa risiko yang dihadapi negara tuan rumah.

2.2 Kerangka Pemikiran

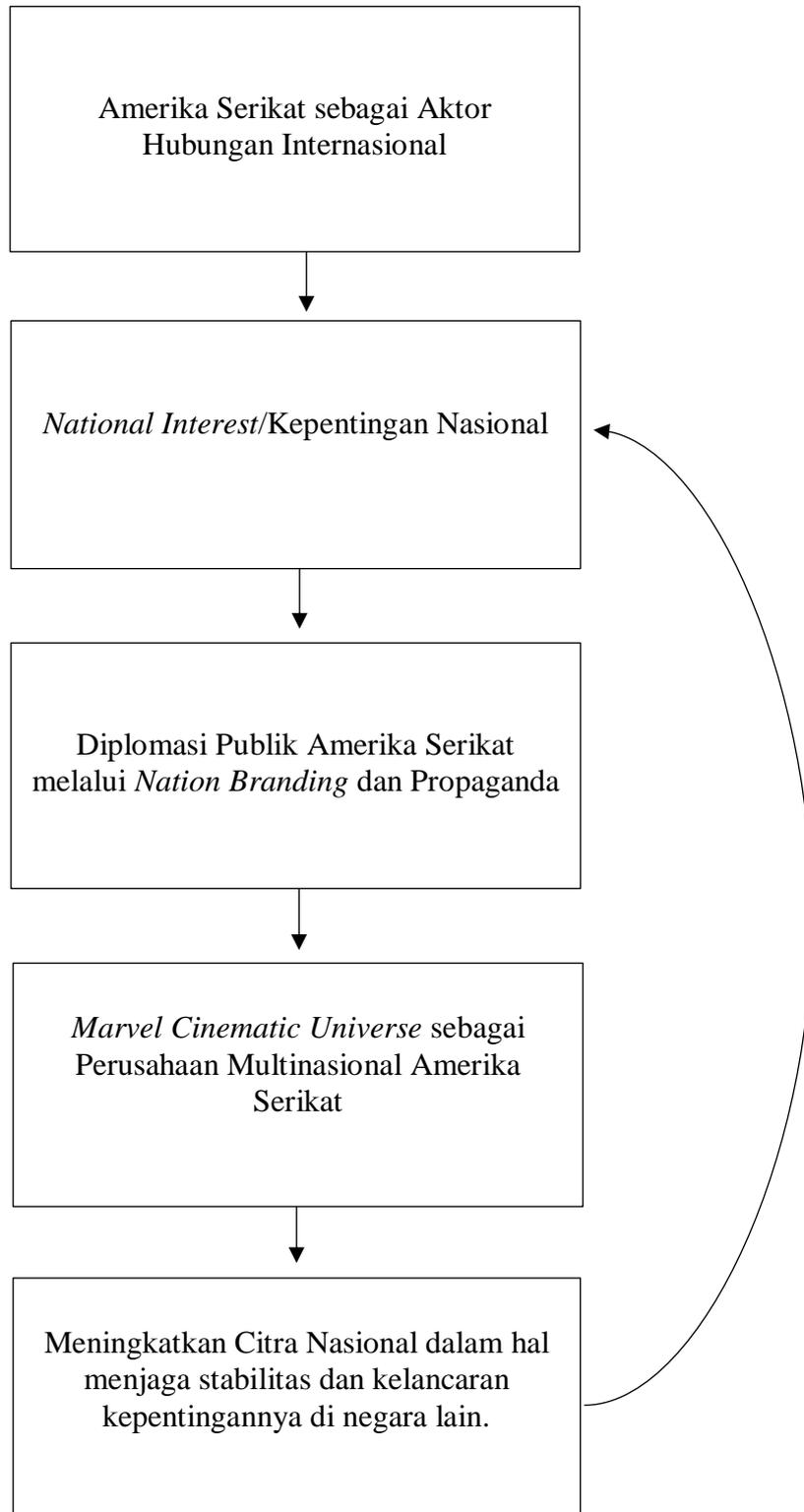
Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan, yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian. Definisi dipaparkan dari buku berjudul Metode Penelitian Kuantitatif karya Dominikus Dolet Unaradjan. Dalam definisi ini, kerangka pemikiran dibuat lebih spesifik untuk karya tulis penelitian ilmiah. Kerangka pemikiran memuat semua variabel penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka pemikiran kemudian penjelasannya dapat digambarkan dalam bentuk susunan bagan yang saling terhubung, atau bagan alir. Sehingga, kerangka pemikiran diartikan juga sebagai suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.

Kerangka pemikiran pada dasarnya adalah susunan seluruh variabel atau segala sesuatu yang nantinya membantu memberikan alur penjelasan yang baik dan benar dari sebuah penelitian. Sedangkan dalam karya tulis umum, seperti

tulisan non ilmiah, Kerangka pemikiran di dalamnya terdapat seluruh permasalahan yang akan diceritakan di dalam karya tulis yang dibuat. Mulai dari pengenalan, lalu penyebab konflik, kemudian proses menyelesaikan konflik, dan bagian ending atau penutup. Semua dicantumkan di dalam kerangka pemikiran.

Pada penelitian saat ini, kerangka pemikiran memiliki konstruk penjelasan dimana Amerika Serikat menggunakan Diplomasi Publiknya untuk mencapai kepentingan nasional melalui Industri Perfilman *Marvel Cinematic Universe* yang merupakan bagian dari *Multinational Company/Multinational Corporation* untuk meningkatkan citra nasional di mata publik internasional dimana hal tersebut merupakan langkah Amerika Serikat dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya. Jika di gambarkan akan muncul susunan bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

